

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya sejak 2015 hingga pertengahan 2023. Menurut data terkini Badan Pusat Statistik (BPS), kini jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 278,696 juta jiwa pada pertengahan tahun 2023. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat terbanyak ke-4 dalam *worldometer* berdasarkan jumlah penduduk ^(1,2).

Kependudukan yang cukup padat dapat menjadi suatu hal yang positif dan negatif bagi negara. Dikatakan positif apabila jumlah penduduk seimbang dengan sumber daya yang tersedia sehingga dapat dijadikan potensi perkembangan ekonomi karena jumlah tenaga kerjanya yang melampaui. Sebaliknya, tergolong negatif jika kependudukan yang banyak jumlahnya tidak dapat dikendalikan dengan baik dan melebihi kapasitas dari negara tersebut untuk menyediakan sumber daya kepada rakyatnya. Hal ini didukung oleh teori Malthus tentang “ketidakseimbangan populasi”, bahwa penduduk cenderung berkembang lebih cepat daripada kapasitas bumi untuk menyediakan sumber daya makanan. Menurut Malthus, Konsekuensi yang didapat dari laju pertumbuhan penduduk yang eksponensial adalah kemelaratan karena populasi yang melebihi kapasitas sumber daya alam⁽³⁾.

Masalah yang dapat timbul akibat tingginya jumlah penduduk yaitu ketidaksejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat berakar dari dalam keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan syarat memiliki ikatan darah, perkawinan, maupun adopsi. Dalam

membangun keluarga sejahtera diperlukan kebutuhan dasar seperti pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Agar terciptanya keluarga yang sejahtera dengan kualitas keluarga yang baik maka pemerintah menyelenggarakan suatu program yang dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB).

Program KB dimulai pertama kali di Indonesia pada tahun 1970. Dimana program ini dibentuk untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang cepat guna mengurangi angka kemiskinan penduduk Indonesia yang berjumlah 25,90 juta menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023. Tujuan dari program KB diatur dalam Undang - Undang Nomor 52 tahun 2009 yang mencakup pengaturan jarak kehamilan, membantu pasangan suami istri dalam menentukan keputusan memilikianak pada usia dan jumlah anak yang ideal dalam keluarga. Program KB bekerja dengan menyediakan metode kontrasepsi yang sesuai dengan pilihan pasangan suami istri⁽⁴⁾.

Kontrasepsi merupakan alat atau metode yang penting dalam mencegah kehamilan yang digunakan oleh pria maupun wanita pada pasangan usia subur. Metode kontrasepsi yang diberikan oleh pemerintah dikategorikan dalam metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan non-metode kontrasepsi jangka panjang (non-MKJP). Kontrasepsi berjenis IUD, vasektomi, tubektomi, dan implan masuk ke dalam kontrasepsi jangka panjang. Sedangkan kontrasepsi jangka pendek terdiri dari suntikan, pil, dan kondom. Berdasarkan survei penggunaan kontrasepsi yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2019 di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, didapatkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah kontrasepsi jenis suntik, dengan jumlah pemakaian 29 dari 210

responden. Diikuti oleh pil KB pada urutan kedua terbanyak, dengan jumlah pemakaian 25 responden. Sedangkan jenis kontrasepsi terendah yang digunakan Pasangan Usia Subur (PUS) di daerah tersebut adalah IUD, dengan jumlah pemakaian 1 responden⁽⁵⁾. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terhadap akseptor KB di Puskesmas Kassi Kassi, Kota Makassar. Dalam penelitian tersebut, kontrasepsi pil merupakan jenis kontrasepsi yang paling sedikit digunakan. Responden berpendapat berdasarkan pengalaman mereka bahwa efek samping dari penggunaan kontrasepsi pil dan pemakaiannya yang cukup merepotkan, sehingga menyebabkan mereka beralih ke jenis kontrasepsi lainnya⁽⁶⁾.

Banyaknya metode kontrasepsi yang tersedia mengakibatkan akseptor KB terkadang bingung memilih jenis kontrasepsi yang tepat untuk dirinya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan seseorang dalam melakukan pemilihan metode kontrasepsi. Menurut teori Green dan Kreuter, faktor yang dapat berperan ialah faktor predisposisi (usia, agama, pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, paritas, penghasilan, status kesehatan ibu, pandangan subjektif akseptor KB), faktor pendukung (fasilitas pelayanan kesehatan) dan faktor pendorong (dukungan suami)⁽⁷⁾.

Berdasarkan penelitian yang melibatkan 84 pasangan usia subur di Puskesmas Gading Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya didapatkan bahwa umur, pekerjaan, paritas, dan status wanita menunjukkan faktor sosiodemografi yang paling berpengaruh dalam pemilihan alat kontrasepsi, sedangkan Pendidikan dan jumlah anak tidak memengaruhi seseorang dalam pemilihan jenis kontrasepsi yang digunakan. Wanita Usia subur yang berumur lebih tua cenderung memilih

jenis kontrasepsi permanen seperti IUD karena banyaknya pengalaman yang didapat tentang KB⁽⁸⁾.

Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai korelasi antara faktor-faktor lainnya seperti penghasilan, dukungan suami, dan fasilitas layanan kesehatan setempat dengan pemilihan alat kontrasepsi baik jenis suntik, pil KB, maupun IUD di daerah Jakarta Timur khususnya di Puskesmas Duren Sawit.

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2020, Jumlah Angka kehamilan tidak diinginkan berdasarkan data BKKBN menyatakan sebesar 17,5%. Laporan Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP KKBPK) Tahun 2020 Kehamilan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam masalah hingga terjadinya aborsi. Agar tidak terjadinya aborsi maka alat kontrasepsi harus dipenuhi untuk menurunkan kejadian hamil tidak diinginkan dan menciptakan keluarga yang harmonis⁽⁹⁾. Jakarta Timur merupakan daerah dengan jumlah peserta KB aktif terbanyak kedua setelah Jakarta Barat padatahun 2021, berjumlah 408,334 akseptor⁽¹⁰⁾.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada populasi di salah satu Puskesmas daerah Jakarta Timur, yaitu Puskesmas Duren Sawit mengenai faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan akseptor KB dalam memilih alat kontrasepsi berjenis IUD, pil, dan suntik di daerah tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Faktor-faktor apa yang memengaruhi keputusan akseptor KB untuk mengatur kehamilannya dengan menggunakan alat kontrasepsi khususnya yang

berjenis pil, suntik KB, dan IUD.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan kontrasepsi IUD, Pil, dan Suntik di Puskesmas Duren Sawit.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap penggunaan kontrasepsi baik yang berjenis IUD, Pil, dan Suntik.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui alat kontrasepsi apa yang paling banyak digunakan berdasarkan jenis suntik, pil, dan IUD.
- 2) Untuk mengetahui hubungan antara usia terhadap pemilihan alat kontrasepsi suntik, pil, dan IUD
- 3) Untuk mengetahui hubungan antara tingkat Pendidikan terhadap pemilihan alat kontrasepsi suntik, pil, dan IUD
- 4) Untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan terhadap pemilihan alat kontrasepsi suntik, pil, dan IUD
- 5) Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap pemilihan alat kontrasepsi suntik, pil, dan IUD
- 6) Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendapatan terhadap pemilihan alat kontrasepsi
- 7) Untuk mengetahui hubungan antara dukungan suami terhadap pemilihan alat kontrasepsi
- 8) Untuk mengetahui hubungan antara fasilitas layanan Kesehatan terhadap

pemilihan alat kontrasepsi

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru serta menjadi dasar penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan kontrasepsi berjenis IUD, suntik, dan juga pil dan menemukan faktor-faktor yang paling dominan dalam penggunaan kontrasepsi

1.5.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pelayanan kesehatan kedepannya dalam memberikan saran yang lebih tepat tentang pemilihan jenis kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasien. Serta dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi motivasi dan penghambat pasien terhadap kontrasepsi dapat membantu pelayanan kesehatan dalam merancang kebijakan dan metode yang efektif untuk mendukung program pengaturan kehamilan guna mengurangi pertumbuhan populasi dan menghindari risiko kesehatan pasien.